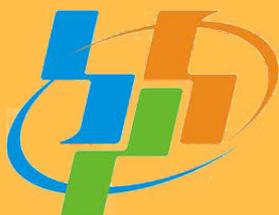


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MAROS 2010-2016

*Gross Regional Domestic Product
by Expenditure of Maros Regency 2010-2016*



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAROS**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN MAROS**

2010 - 2016

<https://maroskab.bps.go.id/>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN MAROS 2010- 2016**

Nomor Publikasi : 73552.1501
Katalog BPS : 9302002.7308

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 80 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Maros, 22 September 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Maros,

Marwanto, S.Si, M. Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	4
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	11
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5 Perubahan Inventori	20
2.6 Ekspor Impor	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAROS BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2010-2016.....	27
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Maros Menurut Pengeluaran...	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	34
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	38
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	43
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	44
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	46
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	48
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	50

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2010-2016.....	51
4.1	PDRB (Nominal)	53
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	54
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	55
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	56
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	57
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	58
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	59
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	60
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	62
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	63
BAB V	PENUTUP	65
	LAMPIRAN	69
	DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2010-2016	29
Tabel 02. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2010-2016.....	30
Tabel 03. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2010 – 2016	31
Tabel 04. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2010 – 2016.....	32
Tabel 05. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros, Tahun 2010- 2016.....	33
Tabel 06. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	34
Tabel 07. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	36
Tabel 08. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	36
Tabel 09. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	37
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	38
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2016.....	39
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2016.....	41
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	43
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	45
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2016.....	46
Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2016.....	48

Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Tahun 2010–2016.....	53
Tabel 18.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010–2016.....	54
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010–2016.....	55
Tabel 20.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Maros, Tahun 2010–2016.....	56
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010–2016.....	57
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Maros Tahun 2010–2016	58
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Maros, Tahun 2010–2016.....	59
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Maros Tahun 2010–2016.....	60
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional, Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2016.....	62
Tabel 26.	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2016.....	63

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 01. Perbandingan PDRB <i>adhb</i> dan <i>adhk</i> 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2016.....	31

<https://maroskab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 01. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros.....	71
Tabel 02. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros	72
Tabel 03. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros.....	73
Tabel 04. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros.....	74
Tabel 05. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros.....	75
Tabel 06. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros.....	76

<https://maroskab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa

tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://maroskab.bps.go.id>

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://malangkab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya

6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,

- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang

dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar,

perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiscal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-Penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial*

leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level Provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor.

Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara *men-deflate* PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh Berlaku* untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh Berlaku* dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB *adh Konstan*-nya diperoleh dengan *men-deflate* nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk *adh Konstan* diperoleh dengan *men-deflate* nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB *adh Konstan*-nya diperoleh dengan cara *mendeflate* nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan

yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh* berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori *adh* Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh* Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori *adh* Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori *adh* Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori *adh* Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori *adh* Konstan

dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)

- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
MAROS BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 - 2016**

<https://maroskab.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Maros akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 s.d 2016, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Maros digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAROS MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang relatif stabil dari tahun 2012-2016, meskipun dalam dua tahun terakhir terlihat sedikit melemah. PDRB Kabupaten Maros terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan arah yang positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.093.841,32	5.804.256,73	6.579.095,70	7.461.129,03	8.306.036,77
2. Konsumsi LNPRT	103.790,36	117.427,15	138.322,72	156.655,31	168.026,55
3. Konsumsi Pemerintah	829.687,26	907.569,25	983.907,43	1.102.404,69	1.263.567,68
4. PMTB	2.038.496,16	2.420.043,46	2.819.646,10	3.162.938,31	3.648.759,29
5. Perubahan Inventori	276.579,04	246.738,52	(138.477,79)	343.880,78	303.450,28
6. Net Ekspor	2.086.267,11	2.470.882,93	3.079.580,75	3.375.757,45	4.201.716,70
Total PDRB	10.428.661,24	11.966.918,04	13.462.074,92	15.602.765,57	17.891.557,28

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku (*adhb*) selama periode tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

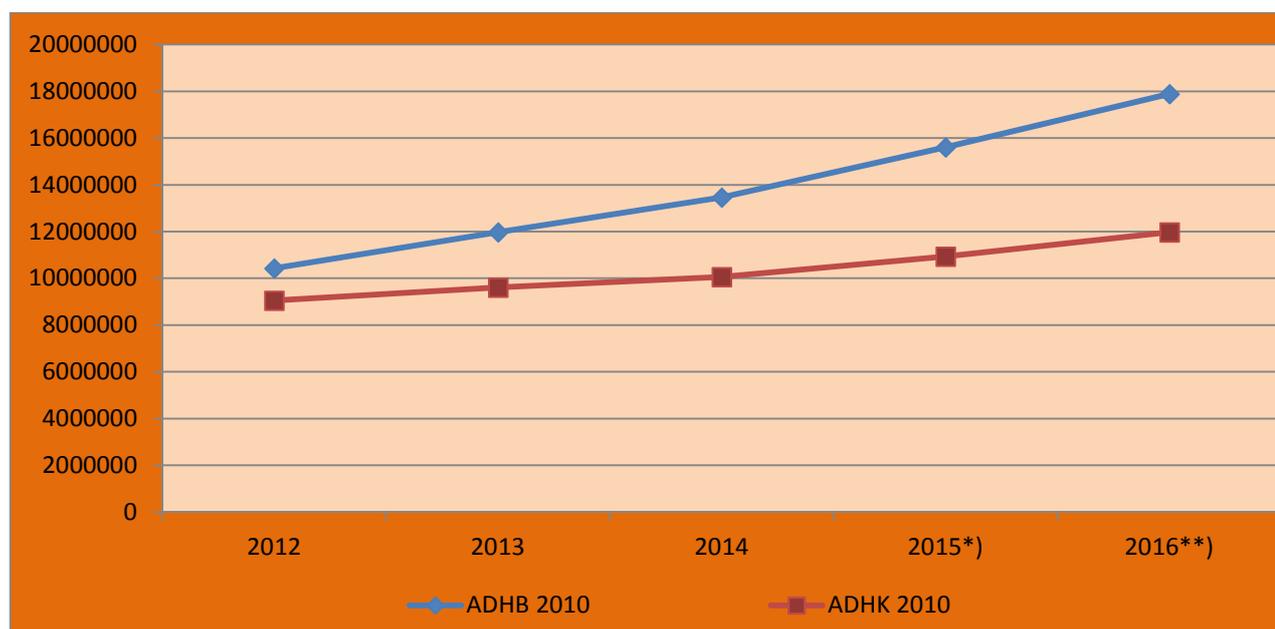
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2012-2016

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.423.176,50	4.725.676,50	4.983.899,05	5.301.616,92	5.667.328,18
2. Konsumsi LNPRT	97.928,58	102.380,36	111.991,68	122.842,58	127.408,22
3. Konsumsi Pemerintah	720.767,29	756.987,37	778.808,91	822.885,00	867.748,27
4. PMTB	1.822.737,11	1.999.640,44	2.159.248,47	2.290.218,46	2.496.256,12
5. Perubahan Inventori	250.412,64	218.640,33	(96.321,38)	224.128,04	191.726,43
6. Net Ekspor	1.729.491,90	1.808.937,45	2.129.197,02	2.168.525,72	2.619.930,82
Total PDRB	9.044.514,02	9.612.262,47	10.066.823,74	10.930.216,72	11.970.398,03

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (*adhk*) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan *adhk*, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran *adhk* menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2012-2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Maros berdasarkan PDRB *adhk* dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB *adhb*, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB *adhk* juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB *adhb* dan *adhk* 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros, Tahun 2012 - 2016



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB *adhb* selalu lebih besar dari nilai PDRB *adhk*. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB *adhb*. Dalam PDRB *adhb* pengaruh faktor harga telah diabaikan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	48,84	48,50	48,87	47,82	46,42
2. Konsumsi LNPRT	1,00	0,98	1,03	1,00	0,94
3. Konsumsi Pemerintah	7,96	7,58	7,31	7,07	7,06
4. PMTB	19,55	20,22	20,95	20,27	20,39
5. Perubahan Inventori	2,65	2,06	-1,03	2,20	1,70
6. Net Ekspor	20,01	20,65	22,88	21,64	23,48
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2012–2016, produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Maros sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen). Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa. Pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar di atas 19 persen. Di sisi lain, perdagangan internasional Kabupaten Maros yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor luar negeri dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor luar negeri cenderung lebih tinggi dari nilai impor luar negeri. Kecenderungan perdagangan internasional Kabupaten Maros dalam periode 2012-2016 selalu menunjukkan posisi “surplus”. Jika melihat ekspor secara keseluruhan (ekspor luar negeri ditambah ekspor antar daerah) juga mempunyai peran yang relatif besar, karena mempunyai kontribusi sekitar 26-28 persen terhadap PDRB; demikian halnya impor secara total masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 35-40 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7,06-7,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros
Tahun 2012 – 2016**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,10	6,84	5,46	6,37	6,90
2. Konsumsi LNPRT	8,98	4,55	9,39	9,69	3,72
3. Konsumsi Pemerintah	4,67	5,03	2,88	5,66	5,45
4. PMTB	13,55	9,71	7,98	6,07	9,00
5. Perubahan Inventori	78,69	-12,69	-144,05	-332,69	-14,46
6. Net Ekspor	13,62	4,59	17,70	1,85	20,82
Total PDRB	11,14	6,28	4,73	8,58	9,52

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros dari tahun 2012-2016 secara rata-rata mencapai 8,05 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 11,14 persen (2012); 6,28 persen (2013); 4,73 persen (2014); 8,58 persen (2015), dan 9,52 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 11,14 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (4,73 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Maros, Tahun 2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	115,16	122,82	132,01	140,73	146,56
2. Konsumsi LNPRT	105,99	114,70	123,51	127,53	131,88
3. Konsumsi Pemerintah	115,11	119,89	126,33	133,97	145,61
4. PMTB	111,84	121,02	130,58	138,11	146,17
5. Perubahan Inventori	110,45	112,85	143,77	153,43	158,27
6. Net Ekspor	120,63	136,59	144,64	155,67	160,38
Total PDRB	115,30	124,50	133,73	142,75	149,47

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

¹ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	5.093.841,32	5.804.256,73	6.579.095,70	7.461.129,03	8.306.036,77
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	4.423.176,50	4.725.676,50	4.983.899,05	5.301.616,92	5.667.328,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	48,84	48,50	48,87	47,82	46,42
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga/Tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	70.179,01	78.534,25	90.104,20	102.337,69	102.337,69
b. ADHK 2010	61.368,25	64.454,37	68.204,70	73.459,00	73.459,00
Rata-rata Konsumsi Per-kapita/ Tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	15.530,10	17.493,45	19.604,21	21.989,77	24.223,62
b. ADHK 2010	13.485,38	14.242,72	14.850,89	15.625,16	16.528,12
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	8,10	6,84	5,46	6,37	6,90
b. Per-RT	7,71	4,95	4,50	4,94	5,78
c. Perkapita	6,82	5,62	4,27	5,21	5,78
Jumlah RT (<i>unit</i>)	72.508	73.816	74.494	75.510	76.308
Jumlah Penduduk (<i>000 org</i>)	327	331	335	339	342

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012–2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adhb*) maupun riil (*adhk*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012 – 2016 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 48,87 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 46,42 persen.

Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adhb* maupun *adhk* 2010. Pada tahun 2012, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Maros menghabiskan dana sekitar 70.252,13 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 78.631,42 ribu rupiah (2013); 88.317,12 ribu rupiah (2014); 98.809,81 ribu rupiah (2015); dan menjadi 108.848,83 ribu rupiah (2016).

Sementara itu, pada perkiraan *adhk* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 7,71 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2016 yaitu sebesar 5,78 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi perkapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik *adhb* maupun *adhk* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Maros meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” berkisar antara 4,27-6,82 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami fluktuasi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adhk* sebesar 8,10 persen pada tahun 2012. Kemudian, melambat pada tahun berikutnya yaitu sebesar 6,84 persen (2013). Selanjutnya melemah menjadi 5,46 persen (2014), menguat kembali menjadi 6,37 persen (2015) dan menguat kembali menjadi 6,90 persen (2016). Sementara itu, pertumbuhan total konsumsi perkapita juga mengalami fluktuasi dari 6,82 persen di tahun 2012 melambat menjadi sebesar 5,62 persen di tahun 2013. Kembali melemah menjadi 4,27 persen (2014) dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 5,21 persen. Pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 5,78 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 8 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2012–2016³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	56,04	55,29	55,35	54,57	53,91
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,93	5,06	5,07	5,05	5,07
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,14	9,46	9,77	9,89	10,17
d. Kesehatan & Pendidikan	8,07	8,21	8,48	8,49	8,76
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,20	14,11	13,25	13,62	13,28
f. Hotel & Restoran	2,99	3,02	3,09	3,07	3,15
g. Lainnya	4,63	4,86	5,00	5,31	5,67
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2012-2016, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Maros, bahwa konsumsi makanan masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 56,04 persen (2012) ; 55,29 persen (2013) ; 55,35 persen (2014) ; 54,57 persen (2015) ; dan 53,91 persen (2016).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2012 – 2016

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,57	6,48	5,16	5,23	6,16
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,41	7,46	7,08	6,62	7,16
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,87	10,84	9,18	7,68	8,10
d. Kesehatan & Pendidikan	7,30	8,27	8,12	7,80	8,70
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,97	3,85	1,68	8,09	7,36
f. Hotel & Restoran	9,63	8,59	6,41	6,26	5,28
g. Lainnya	4,42	8,62	6,39	9,67	9,30

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 9,24 persen (2011) ; 8,78 persen (2012) , 7,49 persen (2013), 8,87 persen (2014) dan 10,02 persen (2015). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Maros, Tahun 2011 – 2015⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,36	5,57	8,21	3,06	3,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	9,45	8,78	10,49	8,36	8,36
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,43	5,69	6,57	3,99	3,99
d. Kesehatan & Pendidikan	8,28	7,09	8,21	9,90	9,90
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,10	9,03	9,43	9,28	9,28
f. Hotel & Restoran	5,72	5,82	9,04	10,48	10,48
g. Lainnya	11,66	9,96	9,62	9,90	9,90

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2010, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 5,06 persen

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

(2011); 9,36 persen (2012); 5,57 persen (2013); 8,21 persen (2014); dan 3,06 persen (2015). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari 4,37 persen (2011) menjadi 9,45 persen di tahun 2012. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu; 8,78 persen (2013); 10,49 persen (2014) dan 8,36 persen (2015).

<https://maroskab.bps.go.id>

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Maros, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	103.790,36	117.427,15	139.719,92	161.500,32	161.500,32
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	97.928,58	102.380,36	113.697,13	123.442,58	123.442,58
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,00	0,98	1,02	1,02	1,02

Secara umum, walaupun proporsi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB cukup kecil, namun rata-rata konsumsi LNPRT di Kabupaten Maros terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adhb* maupun *adhk* 2010. Pengeluaran Konsumsi LNPRT menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu 1,02 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 0,98 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Maros serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Maros, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	829.687,26	929.569,25	1.019.024,56	1.189.324,13	1.189.324,13
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	720.767,29	774.987,37	808.773,60	878.515,70	878.515,70
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,96	7,77	7,46	7,54	7,54
Konsumsi Pemerintah per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	2.549,73	2.801,62	3.036,46	3.505,22	3.505,22
b. ADHK 2010	2.215,01	2.335,73	2.409,96	2.589,20	2.589,20
Konsumsi Pemerintah per pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	115.330,45	130.465,85	145.180,87	153.917,96	153.917,96
b. ADHK 2010	100.190,05	108.770,15	115.226,32	113.694,28	113.694,28
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	4,67	7,52	4,36	8,62	8,62
b. Konsumsi perkapita	3,64	5,45	3,18	7,44	7,44
c. Konsumsi perpegawai	7,35	8,56	5,94	-1,33	-1,33
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	7.194	7.125	7.019	7.727	7.727
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	327	331	335	339	339

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adhb* maupun *adhk* 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adhb* sebesar 736,71 Juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 1.189,32 Juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adhk* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa secara proporsi, pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan, dari 7,06 persen ditahun 2011 menjadi 7,44 persen pada tahun 2015. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

2014; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015. Penurunan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah perkapita *adhb* sebesar 2.286,44 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita *adhk* 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Walaupun dari segi nilai, konsumsi pemerintah perkapita terus meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatannya tidak cukup tinggi, atau dapat dikatakan melambat, hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 7,06 persen pada tahun 2011, dan terus melambat menjadi 3,64 persen di tahun berikutnya (2012), hingga meningkat kembali menjadi 7,44 persen di tahun 2015.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah *adhb* menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 99.853,61 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 153.917,96 ribu rupiah di tahun 2015 (lihat tabel 11). Sementara itu, pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah *adhk* menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2014 kemudian menurun di tahun 2015. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 8,61 persen, dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2015 yaitu minus 1,33 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik *adhb* maupun *adhk* 2010). Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 7.378 orang dan terus mengalami penurunan di tahun 2012, 2013 hingga 2014 sebesar 7.194 pegawai, 7.125 pegawai, dan 7.019 pegawai. Kemudian jumlah pegawai naik kembali menjadi 7.727 pegawai pada tahun 2015. Dalam kurun waktu 2011-2014, secara total terjadi pengurangan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 359 orang atau turun sebesar minus 4,87 persen dari tahun 2011. Penurunan tersebut disebabkan karena pegawai yang pensiun, meninggal, maupun kebijakan pemerintah seperti moratorium pegawai.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah).

Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan mulai tahun 2011 terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2014 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun 2011 sebesar 8,14 persen dan 4,36 persen di tahun 2014; untuk pertumbuhan konsumsi pegawai dalam kurun waktu 2011-2015 terlihat berfluktuasi; sedangkan untuk konsumsi per pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 8,61 persen, sedangkan terendah ditahun 2015 yaitu -1,33 persen.

<https://maroskab.bps.go.id>

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Maros, Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	2.034,86	2.415,95	2.814,90	3.338,22	3.338,22
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1.784,60	1.947,87	2.123,12	2.322,43	2.322,43
Proporsi terhadap PDRB (%)	19,51	20,19	20,60	21,17	21,17
Struktur PMTB ⁸					
a. Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	1.299,52	1.587,49	1.853,55	2.257,65	2.257,65
(%)	63,86	65,71	65,85	67,63	67,63
b. Non Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	735,34	828,46	961,34	1.080,56	1.080,56
(%)	36,14	34,29	34,15	32,37	32,37
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>)	2.034,86	2.415,95	2.814,90	3.338,22	3.338,22
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁹ (%)					
a. Bangunan	12,60	11,13	10,01	10,40	10,40
b. Non Bangunan	10,74	5,80	7,20	7,55	7,55
Total PMTB	11,90	9,15	9,00	9,39	9,39

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi dari 16,35 persen di tahun 2011, menjadi 20,86 persen di tahun 2012 kemudian melambat menjadi 18,73 persen (2013), melambat kembali menjadi 16,51 persen (2014) dan 18,59 persen (2015). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Diatas 60 persen PMTB berasal dari sub komponen bangunan. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2011 sebesar 10,13 persen, dan meningkat lagi cukup tinggi menjadi 12,60 persen di tahun 2012. Pada tahun 2013, sub komponen bangunan mengalami perlambatan kembali yaitu menjadi 11,13 persen, pada tahun 2014

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

melambat cukup drastis menjadi 10,01 persen, dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 10,40 persen. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2011–2015 (tabel 11). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan juga menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2011-2015 pertumbuhan non bangunan cenderung berfluktuatif, meskipun melambat di tahun 2013 yaitu dari 10,35 persen di tahun 2011 menjadi 10,74 persen di tahun 2012. Namun kembali melambat di tahun berikutnya yaitu 5,80 persen di tahun 2013, kembali menguat menjadi 7,20 persen di tahun 2014 dan meningkat kembali menjadi 7,55 persen di tahun 2015.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2011-2015 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 11,90 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 9,00 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Maros, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	169,95	218,46	221,73	260,41	343,88
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	146,57	241,07	248,64	134,10	144,12
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,98	2,09	1,85	1,91	2,18

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2011 perubahan inventori sebesar 169,95 Juta rupiah. Sedangkan tahun 2012 perubahan inventori mengalami penambahan menjadi sebesar 218,46 Juta rupiah, tahun 2013 perubahan inventori kembali mengalami penambahan menjadi sebesar 221,73 Juta, tahun 2014 perubahan inventori kembali meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 260,41 Juta rupiah, dan pada tahun 2015 perubahan inventori kembali meningkat menjadi 343,88 Juta rupiah .

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor impor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar kabupaten, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 14. Perkembangan Net Ekspor Impor Barang dan Jasa Kabupaten Maros, Tahun 2011 - 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Impor					
a. ADHB (Juta Rp)	1.589,31	2.153,31	2.485,14	2.716,24	3.007,18
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1.501,11	1.750,44	1.780,61	1.806,68	1.915,64
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	18,48	20,65	20,77	19,88	19,07
Pertumbuhan ¹⁰					
Total Net Ekspor Impor	21,78	16,61	1,72	1,46	6,03

Secara total, nilai ekspor impor barang dan jasa Kabupaten Maros tahun 2015 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan nilai ekspor impor barang dan jasa, nilai "riil" *adhb* masing-masing tahun sebesar 1.589,31 Juta rupiah (2011); 2.153,31 Juta rupiah (2012); 2.485,14 Juta rupiah (2013); 2.716,24 Juta rupiah (2014) dan 3.007,18 Juta rupiah (2015). Selama kurun waktu 2011-2015, proporsinya ekspor barang dan jasa terhadap total PDRB semakin menurun, yaitu dari 21,78 persen pada tahun 2011 menjadi 6,03 persen di tahun 2015.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor barang dan jasa Kabupaten Maros berupa barang dan sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor barang dan jasa Kabupaten Maros mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu 16,61 persen (2012) dan 1,72 persen (2013). Tajamnya penurunan ekspor barang dan jasa tersebut disebabkan adanya penurunan volume ekspor dalam bentuk barang, terutama komoditi-komoditi ekspor unggulan Kabupaten Maros yaitu semen. Pertumbuhan ekspor barang pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan pertumbuhan yang sangat drastis. Sedangkan pada tahun 2015, ekspor barang dan jasa Kabupaten Maros kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar 6,03 persen (2015).

¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Maros. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Kabupaten Maros, Tahun 2010 - 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor LN					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	10.394,14	13.458,92	13.500,01	15.332,78	10.961,42
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	10.394,14	12.003,48	11.106,03	12.418,05	7.973,67
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,05	6,79	5,91	5,93	3,65
Struktur Impor LN ¹¹					
a. Barang (<i>Juta Rp</i>)	9.766,11	12.775,52	12.768,80	14.447,90	10.360,93
(%)	93,96	94,92	94,58	94,23	94,52
b. Jasa (<i>Juta Rp</i>)	628,03	683,40	731,21	884,87	600,50
(%)	6,04	5,08	5,42	5,77	5,48
Total impor LN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹²					
- Barang	-	15,87	-7,80	12,09	-35,44
- Jasa	-	9,45	-2,17	7,54	-41,47
Total impor LN	-	15,48	-7,48	11,81	-35,79

¹¹Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Indonesia pada periode tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi (baik *adhb* maupun *adhk* 2010). Untuk total nilai impor luar negeri *adhb* tertinggi pada tahun 2013 sebesar 15.332,78 Juta rupiah, dan terendah di tahun 2010 sebesar 10.394,14 Juta rupiah. Sedangkan nilai impor luar negeri berdasarkan harga konstan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana di tahun 2010 sebesar 10.394,13 Juta rupiah, naik menjadi 12.003,48 Juta rupiah di tahun 2011, turun menjadi 11.106,03 Juta rupiah di tahun 2012, kemudian naik kembali menjadi 12.418,05 Juta rupiah di tahun 2013, dan kembali turun secara drastis di tahun 2014 menjadi 7.973,67 Juta rupiah.

Proporsi impor barang dan jasa luar negeri pada tahun 2011 naik menjadi 6,79 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 6,05 persen. Namun mulai tahun 2012 sampai 2014 proporsinya terus menurun, yaitu 5,91 persen (2012), dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 5,93 persen, kemudian kembali turun menjadi 3,65 persen di tahun 2014.

Di sisi lain, pertumbuhan riil nilai impor barang dan jasa luar negeri Kabupaten Maros berfluktuatif. Jika pada tahun 2011 tumbuh cukup signifikan di level 15,48 persen, di tahun 2012 turun sebesar minus 7,48 persen. Pertumbuhan impor barang dan jasa luar negeri Kabupaten Maros kemudian naik kembali menjadi 11,81 persen di tahun 2013. Dan kembali berkontraksi sangat dalam di level minus 35,79 persen di tahun 2014. Hal ini disebabkan pertumbuhan impor barang maupun jasa luar negeri yang mengalami perlambatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar minus 35,44 persen untuk impor barang dan minus 41,47 persen untuk impor jasa.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 94,44 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar wilayah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<http://maroskab.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN KABUPATEN MAROS TAHUN
2011 - 2015

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
- ADHK 2010	171.740,74	185.708,47	202.184,59	217.618,45	234.083,97
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	21.306,72	24.311,75	27.670,97	31.009,71	35.592,64
- ADHK 2010	21.306,72	22.769,27	24.507,22	26.087,08	27.760,72
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-	6,86	7,63	6,45	6,42
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	8.060,4	8.156,1	8.250	8.342	8.432,2
Pertumbuhan	-	1,19	1,15	1,12	1,08

PDRB perkapita Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Maros rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 6 hingga 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,14 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Maros (sekitar 57 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Maros sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	58.537,97	57.263,30	58.192,48	57.690,73	72.679,53
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,70	1,98	2,23	2,58	2,40

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,70 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2013 (2,58) lebih disebabkan karena penurunan nilai ekspor, sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	57.259,19	66.698,23	82.677,07	96.604,57	118.364,52
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,74	1,70	1,57	1,54	1,48

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 1,74 pada tahun 2010 menjadi 1,70 pada tahun 2011. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 1,57 (2012), 1,54 (2013), dan 1,48 (2014). Hal ini terjadi karena adanya penurunan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	99.661,11	113.547,23	129.687,95	149.121,47	174.681,98
b. LNPRT	2.077,10	2.313,83	2.601,07	3.083,42	3.863,84
c. Pemerintah	20.578,07	23.491,34	26.124,21	28.718,94	31.695,13
J u m l a h	122.316,28	139.352,39	158.413,23	180.923,82	210.240,95
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
Proporsi	71,22	70,28	69,39	69,94	70,05

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi. Meskipun konsumsi akhir memiliki kecenderungan semakin menurun, namun proporsinya terhadap PDRB relatif stabil dikisaran 69-71 persen. Artinya produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah sendiri, tetapi diperdagangkan baik ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010–2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)					
a.Luar Negeri	22.971,62	18.704,08	17.035,86	18.749,51	21.723,59
b.Antar Daerah	35.566,35	38.559,22	41.156,62	38.941,22	50.955,94
Total	58.537,97	57.263,30	58.192,48	57.690,73	72.679,53
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	57.259,19	66.698,22	82.677,07	96.604,57	118.364,52
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,02	0,86	0,70	0,60	0,61

Ekspor di Kabupaten Maros lebih didominasi lebih dari 60 persen oleh ekspor antar daerah. Pada tahun 2010 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Namun pada periode-periode sesudahnya, nilai ekspor justru lebih rendah dari PMTB (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain maupun negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Maros Tahun 2010-2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
Impor (ADHB) (Juta Rp)					
a. Luar Negeri	10.394,14	13.458,92	13.500,01	15.332,78	10.961,42
b. Antar Daerah	58.084,54	54.064,29	63.158,73	67.598,38	88.648,68
Total	68.478,68	67.523,21	76.658,74	82.931,16	99.610,10
Rasio PDRB terhadap Impor	2,51	2,94	2,98	3,12	3,01

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010–2014 terus menunjukkan peningkatan dari 2,51 (2010) menjadi 3,01 (2014), yang artinya dari tahun ke tahun, selama periode 2010 hingga 2014, ketergantungan PDRB Kabupaten Maros terhadap produk impor semakin berkurang.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Maros, Tahun 2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)					
(Juta Rp)	171.740,74	198.289,08	228.285,47	258.682,96	300.124,22
%	71,49	74,57	74,40	74,83	75,55
Total nilai Impor ADHB					
(Juta Rp)	68.478,68	67.523,21	76.658,74	82.931,15	99.610,10
%	28,51	25,40	25,14	24,28	24,92
<u>Total Permintaan Akhir</u> ¹³ (Juta Rp)	240.219,42	265.812,29	304.944,21	341.614,11	399.734,32
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 24-28 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 240.219,42 Juta (2010) menjadi sebesar 399.734,32 Juta rupiah (2014).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 171.740,74 Juta rupiah (2010); 198.289,08 Juta rupiah (2011); 228.285,47 Juta rupiah (2012); 258.682,96 Juta rupiah (2013); dan 300.124,22 Juta rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 68.478,68 Juta rupiah (2010); 67.523,21 Juta rupiah (2011); 76.658,74 Juta rupiah (2012); 82.931,15 Juta rupiah (2013); dan 99.610,10 Juta rupiah (2014).

¹³ Termasuk diskrepansi statistik

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kabupaten Maros Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	58.537,97	57.263,30	58.192,48	57.690,73	72.679,53
Nilai Impor (ADHB)(Juta Rp)	68.478,68	67.523,21	76.658,74	82.931,15	99.610,10
Net Ekspor (X - M) (Juta Rp)	-9.940,70	-10.259,91	-18.466,26	-25.240,42	-26.930,57
Rasio Ekspor thdp Impor	0,85	0,85	0,76	0,70	0,73

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Maros dengan luar negeri dan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Maros selalu dalam posisi defisit. Penyebab nilai posisi defisit dikarenakan dominasi nilai impor antar wilayah yang selalu lebih besar dari nilai ekspor antar wilayah, sebaliknya, nilai ekspor luar negeri lebih besar dari impor luar negeri menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Namun karena net ekspor antar wilayah/daerah mempunyai nilai yang lebih besar dari ekspor luar negeri maka posisi neraca perdagangan Kabupaten Maros menjadi defisit. Defisit perdagangan Kabupaten Maros yang terjadi antara tahun 2010 sampai

dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar minus 9.940,70 Juta rupiah (2010), minus 10.259,91 Juta rupiah (2011), minus 18.466,25 Juta rupiah (2012), minus 25.240,41 Juta (2013), dan minus 26.930,57 Juta rupiah (2014).

Sementara rasio ekspor terhadap impor masih dibawah 1 dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 dan 2011 rasionya sebesar 0,85, kemudian 0,76 pada tahun 2012, 0,70 pada tahun 2013, dan 0,73 pada tahun 2014.

<https://maroskab.bps.go.id>

<https://maroskab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2011 - 2015 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Maros pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2011-2015, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Maros terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://maroskab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros

(Juta Rupiah)

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.788.909,74	4.328.880,98	5.093.841,32	5.804.256,73	6.579.095,70	7.461.129,03	8.306.036,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	87.771,14	93.302,17	103.790,36	117.427,15	138.322,72	156.655,31	168.026,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	636.788,85	736.719,95	829.687,26	907.569,25	983.907,43	1.102.404,69	1.263.567,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.447.025,01	1.686.635,01	2.038.496,16	2.420.043,46	2.819.646,10	3.162.938,31	3.648.759,29
5. Perubahan Inventori	122.286,74	167.949,04	276.579,04	246.738,52	(138.477,79)	343.880,78	303.450,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	5.031.600,92	6.159.667,36	7.909.185,39	9.423.226,65	10.712.777,49	12.354.962,79	14.772.829,01
7. Impor Barang dan Jasa	3.798.932,69	4.570.836,85	5.822.918,28	6.952.343,72	7.633.196,74	8.979.205,34	10.571.112,31
PDRB	7.315.449,71	8.602.317,65	10.428.661,24	11.966.918,04	13.462.074,92	15.602.765,57	17.891.557,28

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros

(Juta Rupiah)

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.788.909,74	4.091.600,93	4.423.176,50	4.725.676,50	4.983.899,05	5.301.616,92	5.667.328,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	87.771,14	89.859,54	97.928,58	102.380,36	111.991,68	122.842,58	127.408,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	636.788,85	688.619,45	720.767,29	756.987,37	778.808,91	822.885,00	867.748,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.447.025,01	1.605.179,69	1.822.737,11	1.999.640,44	2.159.248,47	2.290.218,46	2.496.256,12
5. Perubahan Inventori	122.286,74	140.135,72	250.412,64	218.640,33	(96.321,38)	224.128,04	191.726,43
6. Ekspor Barang dan Jasa	5.031.600,92	5.831.825,68	6.660.657,96	7.115.451,23	7.467.351,20	8.056.169,88	8.889.407,24
7. Impor Barang dan Jasa	3.798.932,69	4.309.632,60	4.931.166,06	5.306.513,77	5.338.154,18	5.887.644,16	6.269.476,42
PDRB	7.315.449,71	8.137.588,41	9.044.514,02	9.612.262,47	10.066.823,74	10.930.216,72	11.970.398,03

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros

(Persen)							
Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,79	50,32	48,84	48,50	48,87	47,82	46,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,20	1,08	1,00	0,98	1,03	1,00	0,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,70	8,56	7,96	7,58	7,31	7,07	7,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,78	19,61	19,55	20,22	20,95	20,27	20,39
5. Perubahan Inventori	1,67	1,95	2,65	2,06	(1,03)	2,20	1,70
6. Ekspor Barang dan Jasa	68,78	71,60	75,84	78,74	79,58	79,18	82,57
7. Impor Barang dan Jasa	51,93	53,13	55,84	58,10	56,70	57,55	59,08
PDRB	100,00						

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros

(Persen)						
Komponen	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,99	8,10	6,84	5,46	6,37	6,90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,38	8,98	4,55	9,39	9,69	3,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,14	4,67	5,03	2,88	5,66	5,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,93	13,55	9,71	7,98	6,07	9,00
5. Perubahan Inventori	14,60	78,69	(12,69)	(144,05)	(332,69)	(14,46)
6. Ekspor Barang dan Jasa	15,90	14,21	6,83	4,95	7,89	10,34
7. Impor Barang dan Jasa	13,44	14,42	7,61	0,60	10,29	6,49
PDRB	11,24	11,14	6,28	4,73	8,58	9,52

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	105,80	115,16	122,82	132,01	140,73	146,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	103,83	105,99	114,70	123,51	127,53	131,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	106,99	115,11	119,89	126,33	133,97	145,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	105,07	111,84	121,02	130,58	138,11	146,17
5. Perubahan Inventori	119,85	110,45	112,85	143,77	153,43	158,27
6. Ekspor Barang dan Jasa	105,62	118,74	132,43	143,46	153,36	166,18
7. Impor Barang dan Jasa	106,06	118,08	131,02	142,99	152,51	168,61
PDRB	105,71	115,30	124,50	133,73	142,75	149,47

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros

(Persen)						
Komponen	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,80	8,85	6,65	7,48	6,61	4,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,83	2,08	8,22	7,69	3,25	3,42
		7,60	4,20	5,04	7,45	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,99	7,60	4,15	5,37	6,04	8,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,07	6,44	8,21	7,90	5,76	5,84
5. Perubahan Inventori	19,85	(7,84)	2,17	27,39	6,72	3,16
6. Ekspor Barang dan Jasa	5,62	12,42	11,53	8,33	6,90	8,36
7. Impor Barang dan Jasa	6,06	11,34	10,95	9,14	6,65	10,56
PDRB	5,71	9,07	7,97	7,41	6,75	4,70

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://maroskab.bps.go.id>

<https://maroskab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA



<https://maroskab.bps.go.id>



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macro Economic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

17. _____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerja sama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, WashingtonDC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<https://maroskab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAROS**
Statistics of Maros Regency

Jl. Jendral Sudirman KM. 27

Petuadae, Turikale, 90516

Telp:(0411) 3875505, Fax:(0411) 3875505

Homepage: <http://maroskab.bps.go.id>, Email: bps7308@bps.go.id